



Dinamika Pemilihan Kepala Desa (Studi Konflik Sosial yang Muncul Pasca Pemilihan)

Dules Ery Pratama Harahap¹, Murniwati Lase², Julia Ivanna³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan,
Indonesia

e-mail: erydules@gmail.com, watimurni575@gmail.com, juliaivanna@unimed.ac.id

Abstract. Village Head Election (Pilkades) is a form of local democracy that serves as a forum for community participation in determining leaders at the village level. However, behind this democratic process, social dynamics often emerge that lead to conflict between residents. This study aims to examine the forms, causes, and impacts of social conflict that occurred after the village head election. Using a qualitative-descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies in one of the villages that experienced conflict after the Pilkades. The results of the study show that the conflict was generally triggered by dissatisfaction with the election results, allegations of fraud, and rivalry between groups supporting candidates. This conflict has an impact on disrupting social harmony, decreasing community participation in village activities, and the emergence of social segregation. This study emphasizes the importance of an effective dispute resolution mechanism, the neutrality of the election committee, and the active role of community leaders in reducing potential conflict. These findings are expected to provide input for Pilkades organizers and related parties in creating a peaceful and constructive election process.

Keywords: Village head election, social conflict, post-election,

Abstrak. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk demokrasi lokal yang menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin di tingkat desa. Namun, di balik proses demokratis ini, tidak jarang muncul dinamika sosial yang berujung pada konflik antarwarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk, penyebab, serta dampak konflik sosial yang terjadi pasca pemilihan kepala desa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di salah satu desa yang mengalami konflik pasca Pilkades. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik umumnya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan, dugaan kecurangan, serta rivalitas antarkelompok pendukung calon. Konflik ini berdampak pada terganggunya keharmonisan sosial, penurunan partisipasi warga dalam kegiatan desa, hingga munculnya segregasi sosial. Studi ini menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, netralitas panitia pemilihan, serta peran aktif tokoh masyarakat dalam meredam potensi konflik. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyelenggara Pilkades dan pihak terkait dalam menciptakan proses pemilihan yang damai dan konstruktif.

Kata kunci: Pemilihan kepala desa, konflik sosial, pasca pemilihan,

1. PENDAHULUAN

Salah satu perwujudan demokrasi dalam konteks keindonesiaan hari ini adalah pemilihan kepala desa. Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Runtuhnya masa Orde Baru dan hadirnya liberalisasi politik membawa perubahan bagi kondisi sosial dan politik mulai dari tingkat lokal. Liberalisasi politik membuka ruang bagi setiap individu untuk turut serta berpartisipasi di panggung politik pemerintahan baik tingkat lokal hingga nasional. Hal ini memberikan angin segar bagi kalangan yang selama ini terpinggirkan karena status sosial (Razak & Harakan,

2017) dalam (Ahmad Taufik, 2018: 15). Dalam praktiknya, pilkades ini telah dilaksanakan di seluruh Indonesia. Sejalan dengan Undang-undang no. 6 tahun 2014, maka dinamika pemilihan kepala desa itu makin memperlihatkan adanya situasi yang demokratis di desa. Dalam praktiknya, pilkades ini telah dilaksanakan di seluruh Indonesia. Sejalan dengan Undang-undang no. 6 tahun 2014, maka dinamika pemilihan kepala desa itu makin memperlihatkan adanya situasi yang demokratis di desa dalam memilih pemimpinnya. Pemilihan kepala desa merupakan bagian integral dari sistem demokrasi di tingkat lokal yang memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung. Di Indonesia, pemilihan kepala desa tidak hanya memiliki dimensi politik, tetapi juga sosial dan budaya yang sangat kental. Proses ini kerap kali melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang, kepentingan, dan afiliasi yang berbeda, sehingga rentan memicu ketegangan sosial apabila tidak dikelola secara bijak. Di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pelaksanaan pemilihan kepala desa terakhir mencerminkan antusiasme 2 masyarakat dalam berpartisipasi memilih pemimpin desa. Namun, di balik tingginya partisipasi tersebut, muncul berbagai persoalan sosial pascapemilihan. Konflik antarpendingkal calon kepala desa, ketegangan antarkelompok masyarakat, serta munculnya sikap saling curiga dan eksklusivitas sosial menjadi dinamika yang mencolok setelah pemungutan suara selesai dilakukan. Konflik yang muncul pasca pemilihan tidak hanya berdampak pada hubungan sosial antarwarga, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas pemerintahan desa dan menghambat pelaksanaan program pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa proses demokrasi di tingkat desa masih menyisakan tantangan dalam hal penerimaan hasil pemilihan secara damai dan konstruktif. Fenomena ini penting untuk dikaji secara lebih mendalam guna mengetahui akar penyebab konflik sosial yang muncul pasca pemilihan kepala desa, serta bagaimana masyarakat dan aparat desa merespons dan menyelesaikan konflik tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika sosial yang menyertai pemilihan kepala desa, khususnya di Desa Bandar Setia, serta memberikan kontribusi terhadap upaya menciptakan iklim demokrasi lokal yang lebih sehat dan harmonis.

2. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (dalam tulisan Safarudin:2023), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis

data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Artinya, metode penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dengan metode itu, peneliti dapat belajar mengeksplorasi dan memahami pengalaman manusia dan atau kelompoknya. Penelitian kualitatif atau disebut metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan observasi dan wawancara berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh Kepala Desa Bandar Setia, Bapak Sugiato, serta Sekretaris Desa Bapak Amran, Bendahara Desa Ibu Damayanti. Adapun hasil dari penelitian yang telah kami lakukan sebagai berikut: Data Responden Pertanyaan Jawaban Kepala Desa Bandar Setia, Bapak Sugiato Menurut bapak, bagaimana suasana pemilihan kepala desa kemarin, apakah ramai atau ada ketegangan? Apakah selama proses pemilihan ada perselisihan atau konflik antara warga atau tim sukses dan bagaimana penyelesaian dari masalah ini sendiri? Apa yang biasanya jadi penyebab utama konflik waktu pemilihan kepala desa? Menurut bapak apa yang bisa dilakukan agar pemilihan kepala desa ke depannya lebih damai dan lancar? Menurut saya untuk suasana pemilihan desa di bandar setia ini cukup ramai ya, mereka sangat antusias setiap kali adanya pemilihan kades disini. Untuk ketegangan itu sendiri tidak ada, karena para masyarakat disini sendiri sudah mengenal atau sudah tau tentang calon kepala desa yang akan dipilih. Dan kita juga para pencalon kemarin mendekatkan diri/bersosialisasi kepada masyarakat disini serta kami juga mendapatkan dukungan dari mereka. Ya, untuk konflik yang terjadi pada saat pasca pemilihan itu ada tetapi bukan konflik yang sangat besar atau membuat semua nya kacau, hanya saja ada sedikit kesalahpahaman sehingga terjadi konflik dan untuk penyelesaiannya sendiri kami para calon dan beberapa pihak-pihak desa lainnya melakukan penyelesaian konflik melalui dialog dan mediasi terhadap masyarakat dan agar selalu terciptanya keharmonisan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap kami para pihak pemerintah desa. Yah untung konflik atau permasalahan yang terjadi pada pemilihan kades kemarin itu dari ketegangan antar kelompok pendukung, dugaan kecurangan, kekecewaan terhadap pemimpin sebelumnya. Yang dapat dilakukan agar pemilihan kepala desa ke depannya tidak terjadi konflik lagi dimulai dari pembentukan panitia, pembentukannya secara independen jangan yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan calon kepala desa selanjutnya, lalu panitia harus paham akan peraturan dan paham akan syarat-syarat ketentuan untuk memilih, seperti contohnya harus memiliki KTP, dan untuk calon ini sendiri tidak boleh pernah dihukum dan pastinya pihak 16es

aini selalu mengajak para masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Ibu Sirmauli Simbolon,(IRT) Bagaimana ibu menilai proses pemilihan kepala desa terakhir. Apakah Ibu ikut serta dalam memberikan suara saat pemilihan kepala desa? Mengapa iya/tidak Apakah selama masa kampanye dan pemilihan, terjadi ketegangan antar warga atau antar kelompok pendukung calon? Bagaimana hubungan antar tetangga atau antar keluarga selama masa pemilihan? Apakah sempat terjadi perpecahan? Apakah setelah pemilihan, terjadi perselisihan antara kelompok pendukung calon kepala desa? Ya,saya melihat pemilihan kemarin sudah baik ya. Iya,saya dan keluarga saya selalu ikut serta dan berpartisipasi setiap pemilihan kepala desa. Untuk rasa ketegangan pada saat pemilihan ada tapi tidak yang terlalu berlebihan. Ya untuk hubungan antar tetangga dan keluarga baik baik saja walaupun kita berbeda pilihan. Untuk perselisihan sendirin ada ya kemarin,dikarenakan ada nya salah penghitungan suara,tapi langsung diselesaikan pada saat itu juga. Ibu Anggi(IRT) Bagaimana ibu menilai proses pemilihan kepala desa terakhir. Apakah Ibu ikut serta dalam memberikan suara saat pemilihan kepala desa? Mengapa iya/tidak, Saya melihat untuk pemilihan kemarin baik walaupun sedikit anak kesalahpahaman, saya selalu ikut memberikan suara pada saat pemilihan kepala desa. Apakah selama masa kampanye dan pemilihan, terjadi ketegangan antar warga atau antar kelompok pendukung calon? Bagaimana hubungan antar tetangga atau antar keluarga selama masa pemilihan? Apakah sempat terjadi perpecahan? Apakah setelah pemilihan, terjadi perselisihan antara kelompok pendukung calon kepala desa? Iya,pada saat pemilihan kemarin ada ketegangan para warga,ketegangan itu terjadi karena adanya salah penghitungan suara sehingga membuat para warga sedikit ricuh dengan panitia Untuk saya pribadi sih tidak ada perselisihan antara keluarga maupun tetangga. Ya, setelah pemilihan kepala desa sempat terjadi perselisihan antara kelompok pendukung calon kepala desa serta panitia dengan warga tetapi langsung diselesaikan dan tidak ada keberlanjutan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Bandar Setia Bapak Sugiato,dan dua masyarakat bandar setia diperoleh pemahaman mendalam tentang dinamika pemilihan kepala desa:studi konflik sosial yang muncul pasca pemilihan.Yang dimana bapak sugiato,ibu sirmauli dan ibu anggi mengatakan bahwa pemilihan kepala desa di desa bandar setia ini cukup baik setiap tahunnya,walaupun ada konflik yang terjadi.Mereka berharap agar konflik- 19 konflik tersebut tidak terulangi,sehingga memberikan suasana yang harmonis dan baik antara masyarakat maupun pihak desa. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah salah satu pilar penting demokrasi di tingkat akar rumput Indonesia. Meskipun bertujuan untuk memilih pemimpin yang legitim dan akuntabel, proses Pilkades seringkali tidak lepas dari potensi konflik sosial yang dapat memecah belah masyarakat. Konflik ini tidak hanya terjadi selama

kampanye, tetapi seringkali justru memuncak setelah pengumuman hasil pemilihan. Pilkades seringkali memperlihatkan ketegangan sosial sejak masa kampanye, pencoblosan, hingga pasca pengumuman hasil. Kondisi ini semakin kompleks jika pemilihan diwarnai dengan kecurigaan terhadap proses, tuduhan kecurangan, atau selisih suara yang sangat tipis. Berdasarkan hasil observasi dan data wawancara dari desa bandar setia mengalami konflik pasca Pilkades, terdapat beberapa bentuk konflik sosial yang dominan seperti: 1. Konflik Antar Pendukung Calon Konflik ini biasanya terjadi karena loyalitas yang sangat kuat terhadap calon kepala desa. Pendukung yang calonnya kalah sering tidak menerima hasil pemilihan, apalagi jika prosesnya dinilai tidak adil. Konflik ini dapat berwujud bentrok fisik, saling boikot, bahkan sabotase program pembangunan. 2. Isu Kecurangan dan Manipulasi Tuduhan politik uang, pemalsuan daftar pemilih tetap (DPT), dan intervensi pihak luar seperti aparat pemerintah menjadi isu utama yang memicu konflik. Ketika sistem pengawasan tidak berjalan optimal, masyarakat merasa proses demokrasi tidak berjalan jujur dan transparan. Pilkades atau Pemilihan Kepala Desa dianggap sebagai dasar dari perwujudan demokrasi yang paling nyata di tingkat desa, karena pada saat pilkades di nilai sebagai kompetisi yang bebas, partisipasi aktif dari masyarakat, dan pemilihan langsung dengan prinsip “satu orang satu suara”. Dalam Peraturan 20 Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 46 dan 53 tentang Desa disebutkan bahwa, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa dari beberapa calon yang telah memenuhi syarat. Pemilihan kepala desa ini dilakukan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keterangan lebih lanjut mengenai prosedur pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, pilkades merupakan suatu kegiatan yang biasa dilakukan di setiap desa sebagai salah satu bagian dari proses rutin pergantian kepemimpinan desa. Kepala desa sendiri adalah sosok yang memimpin pemerintahan di desa, masa jabatan kepala desa biasanya berlangsung selama 6 tahun dan dapat diperpanjang untuk satu masa jabatan tambahan. Dalam negara demokrasi, partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam setiap proses politik atau pemilihan umum yang di mana diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam prosesnya (Gosango, 2013). Pada dasarnya, partisipasi politik adalah tindakan seorang individu atau kelompok untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik termasuk melalui pemilihan pemimpin negara maupun pemimpin desa dan mempengaruhi kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Surbakti dalam Sastroatmodjo mengatakan bahwa terdapat dua konsep variabel yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang, yaitu kesadaran politik dan keyakinan politik terhadap pemerintah. Dalam konteks pemilihan kepala desa, kedua aspek ini tentunya menjadi dasar dalam penilaian partisipasi politik

masyarakat begitupun di Desa Ngadas tersendiri. Kesadaran politik yang mengacu pada tingkat pemahaman dan kesadaran individu terhadap konflik-konflik politik yang terjadi di lingkungannya, termasuk pemahaman tentang peran dan tanggung jawab kepala desa. Semakin tinggi kesadaran politik seseorang, semakin besar juga kemungkinannya untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, seperti mencalonkan diri sebagai kepala desa. Selain itu, keyakinan politik terhadap pemerintah merujuk pada sikap, pandangan, dan kepercayaan individu terhadap kinerja dan integritas pemerintah. Jika individu mempunyai keyakinan politik yang positif terhadap pemerintah, maka mereka mungkin akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa dan mendukung proses politik secara aktif. Sebaliknya, jika individu tersebut mempunyai keyakinan politik negatif terhadap pemerintah, mereka mungkin akan cenderung tidak tertarik atau tidak ingin untuk ikut berpartisipasi. Pemilihan kepala desa sendiri terangkai dalam beberapa proses yang terdiri dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan kepala desa. Sesuai dengan aturan yang terkandung dalam Permendagri 112 tahun 2014, pemilihan kepala desa diselenggarakan oleh panitia pemilihan kepala desa yang disebut Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa. Panitia pemilihan desa bertugas dalam melaksanakan setiap tahapan pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan kepala desa (Pilkades) kerap menjadi pemicu konflik sosial yang signifikan di tingkat akar rumput. Konflik ini bukan hanya sekadar perselisihan personal, melainkan manifestasi dari berbagai faktor kompleks yang melibatkan perebutan kekuasaan, sumber daya, dan pengakuan sosial. Beberapa poin kunci yang dapat disimpulkan adalah: Pilkades sebagai Arena Perebutan Kekuasaan dan Sumber Daya: Pemilihan kepala desa tidak hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang menguasai akses terhadap sumber daya desa (anggaran, proyek, kebijakan) dan jaringan sosial. Hal ini menjadikan persaingan sangat ketat dan memicu friksi yang mendalam. Peran Tokoh Lokal dan Fanatisme Pendukung: Keterlibatan tokoh-tokoh berpengaruh di desa seringkali membentuk blok-blok pendukung yang kuat. Fanatisme terhadap calon tertentu, yang didasari oleh ikatan kekerabatan, patronase, atau janji-janji politik, dapat meruncingkan polarisasi dan menyulut emosi saat hasil tidak sesuai harapan. Ketidakpuasan terhadap Hasil dan Proses: Persepsi adanya kecurangan, manipulasi suara, atau ketidakadilan dalam proses pemilihan, terlepas dari kebenarannya, seringkali menjadi justifikasi utama munculnya konflik. Kekalahan sulit

diterima, terutama jika ada dugaan pelanggaran. Dampak Konflik pada Kehidupan Sosial Desa: Konflik pasca-Pilkades memiliki konsekuensi serius, mulai dari pecahnya hubungan kekerabatan dan tetangga, terhambatnya pembangunan desa akibat perpecahan, hingga munculnya ketegangan yang berkepanjangan dan rasa tidak aman di masyarakat. Polarisasi ini dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Lemahnya Mekanisme Penyelesaian Konflik Formal dan Informal: Kurangnya saluran yang efektif dan dipercaya untuk menyelesaikan sengketa Pilkades, baik melalui jalur hukum formal maupun mediasi informal, memperparah kondisi konflik. Masyarakat sering merasa tidak ada tempat yang adil untuk menyuarkan keluhan mereka.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Falah, M. F., & Fauzi, A. M. (2021). Analisis Konflik Pilkades Desa Sudimoro Tahun 2020 Terkait Money Politik. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 6(3).
- Hutajulu, H. M. R., Putri, A., & Ivanna, J. (2024). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 38-49.
- Setiawan, P. W. D., Nuswantari, N., & Kokotiasa, W. (2020). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, kabupaten Magetan). *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 120-129.
- Sofyan, A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 1-14.
- Hendrajad, G. C. (2024). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PURI TAHUN 2021 DI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH (Doctoral dissertation, IPDN).
- Farhan, M., & Arifin, S. (2025). Membaca Konflik Dan Relasi Kuasa Pada Masyarakat Menengah Religius-Industrialis: Studi Pembacaan Fenomena Konflik Versi Marx, Coser, Dan Dahrendorf. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 7(01), 34-46.
- Lismita, L., & Putra, E. V. (2024). Polarisasi Politik Pasca Pemilihan Kepala di Desa Ulak Mengkudu Sumatera Selatan. *Jurnal Perspektif*, 7(4), 406-416.
- Oktapiani, A., Agatha, R. O., Luthfia, S., & Witianti, S. (2024). Dinamika dalam Pemilihan Kepala Desa Ngadas Kabupaten Malang Tahun 2023. *UNES Law Review*, 6(3), 8189-8196.